

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warganegara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya. Sumbangan inisiatif dan kreatifitas dapat disampaikan dalam rapat kelompok masyarakat atau pertemuan-pertemuan, baik yang bersifat formal maupun informal. Dalam rapat kelompok atau pertemuan itu, akan saling memberi informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi dalam partisipasi terdapat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara sesama anggota masyarakat. Berikut ini akan dipaparkan mengenai partisipasi masyarakat, yaitu:

2.1.1 Pengertian Partisipasi

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Partisipasi dapat diartikan sebagian “pengikutsertaan/peran serta” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama (Sumaryadi: 2010:46).

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk

kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Konsep partisipasi itu sendiri telah lama menjadi bahan kajian. Kata “partisipasi” dan “partisipatoris” merupakan dua kata yang sangat sering digunakan dalam bangunan. Keduanya memiliki banyak makna yang berbeda. Pengertian partisipasi menurut Mikkelson (2011:58), antara lain sebagai berikut.

“(a) partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. (b) partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. (c) partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. (d) partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial. (e) partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. (f) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.”

Sedangkan menurut Uphoff, Kohen, dan Goldsmith (dalam Nasution, 2009:16), partisipasi merupakan istilah deskriptif yang menunjukkan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam berbagai situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor

pendukungnya, yaitu: adanya kemauan, adanya kemampuan dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

Kemampuan dan kemauan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, walaupun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi.

Dari pendapat tersebut, diketahui unsur partisipasi adalah a) harus ada tujuan bersama yang hendak dicapai; b) adanya dorongan untuk menyumbang atau melibatkan diri bagi tercapainya tujuan bersama; c) keterlibatan masyarakat baik secara mental, emosi dan fisik, dan; d) harus adanya tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan kelompok.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, secara lengkap dikemukakan oleh Mubyarto (dalam Sumaryadi, 2010:49). Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut oleh karena itu; (a) Kegiatan sasaran pembangunan masyarakat, yaitu perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, pembangkitan

partisipasi masyarakat, dan penumbuhan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tidak berdiri sendiri, melainkan diusahakan agar yang satu berkaitan dengan yang lain, sehingga ketiganya dapat dianggap sebagai satu paket usaha. (b) Peningkatan taraf hidup masyarakat diusahakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat, dan juga sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat. (c) Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. (d) Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri terdapat hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi satu mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat yang berkemampuan demikian bisa membangun desanya dengan atau tanpa partisipasi vertikal dengan pihak lain. (e) Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya.

Partisipasi melibatkan mental dan emosi lebih banyak dari pada fisik seseorang. Partisipasi yang didorong oleh mental dan emosi disebut partisipasi otonom, sedangkan partisipasi didorong dengan paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong seseorang atau kelompok untuk menyumbang atau mendukung kegiatan bersama, berdasarkan kesukarelaan sehingga tumbuh rasatanggung jawab bersama terhadap kepentingan kelompok atau organisasi.

Partisipasi secara umum merupakan peran serta atau keikutsertaan/keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Dalam rangka memperoleh hasil yang optimal, dikatakan oleh Mikkelsen (2011:56) bahwa dibutuhkan pendekatan yang mensinergikan potensi masyarakat. Pendekatan ini memerlukan perencanaan matang yang mendorong peran serta aktif masyarakat.

Lebih lanjut Soetrisno (dalam Nasution, 2009:16) menyatakan bahwa ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat yaitu : Definisi pertama, partisipasi adalah dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan perencana; Kedua, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Menurut definisi ini, ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan program yang ada di wilayah mereka. Ukuran lainnya adalah ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan itu.

Definisi mana yang akan dipakai akan sangat menentukan keberhasilan dalam mengembangkan dan memasyarakatkan sistem pembangunan wilayah yang

partisipatif. Dari sudut pandang sosiologis, definisi pertama tidak dikatakan sebagai partisipasi rakyat dalam pembangunan, melainkan mobilisasi rakyat dalam pembangunan. Mobilisasi rakyat dalam pembangunan hanya dapat mengatasi permasalahan pembangunan dalam jangka pendek. Di Indonesia cenderung menggunakan definisi pertama dalam proses pembangunan, baik yang bersifat nasional maupun regional.

Lebih lanjut Mikkelsen (2011:57) menegaskan bahwa: Dua alternatif dalam pembangunan partisipasi berkisar pada partisipasi sebagai tujuan pada dirinya sendiri atau sebagai alat untuk mengembangkan diri. Logikanya, kedua interpretasi itu merupakan suatu kesatuan, suatu rangkaian. Keduanya mewakilipartisipasi yang bersifat transformasional dan instrumental dalam suatu kegiatan tertentu, serta dapat kelihatan dalam kombinasi yang berbeda.

Kruks (1983) (dalam Mikkelsen, 2011:59) menyebutkan bahwa partisipasi instrumental terjadi ketika partisipasi dilihat sebagai suatu cara untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan partisipasi transformasional terjadi ketika partisipasi itu dipandang sebagai tujuan, dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, misalnya swadaya dan dapat berkelanjutan.

Sebagai sebuah tujuan, partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yaitu setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Dalam bentuk alternatif, partisipasi ditafsirkan

sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen kegiatan sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan.

Dengan demikian dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dirangkum indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:

a) ikut serta mengajukan usul atau pendapat mengenai usaha-usaha pembangunan baik yang dilakukan langsung maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada; b) ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang penentuan program mana yang dianggap cocok dan baik untuk masyarakat; c) ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah termasuk dalam hal ini memberikan sumbangan, baik berupa tenaga, iuran uang dan material lainnya; d) ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan bersama termasuk di dalam mengajukan saran, kritik dan meluruskan masalah yang tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan tersebut; e) dengan istilah lain ikut serta bertanggung jawab terhadap berhasilnya pelaksanaan program yang telah ditentukan bersama; f) ikut serta menikmati dan memelihara hasil-hasil dari kegiatan pembangunan.

2.1.2 Jenis Partisipasi

Berdasarkan sistem dan mekanisme partisipasi, Uphoff *et al.* (1979: 6-7) (dalam Nasution, 2009:18), membedakan partisipasi atas 4 jenis: a) *participation in decision making*; b) *participation in implementation*; c) *participation in benefits*; d) *participation in evaluation*. *Participation in decision making* adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan

Indria Septian Kusnaeni, 2014

Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat, secara tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.

Participation in implementation adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang.

Participation in benefit adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerataan kesejahteraan dan fasilitas, pemerataan usaha dan pendapatan, ikut menikmati atau menggunakan hasil-hasil pembangunan (jalan, jembatan, gedung, air minum dan berbagai sarana serta prasarana sosial) adalah

bentuk dari partisipasi dalam menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Penikmatan program pembangunan juga ditujukan kepada pegawai pengelola dalam peningkatan kesejahteraannya termasuk peningkatan daya potensi dan kreatifitasnya. Partisipasi pemanfaatan ini selain dapat dilihat dari penikmatan hasil-hasil pembangunan, juga terlihat pada dampak hasil pembangunan terhadap tingkat kehidupan masyarakat, peningkatan pembangunan berikutnya dan partisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan hasil-hasil pembangunan.

Participation in evaluation adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasilhasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

2.1.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Dalam kaitan dengan pembangunan. Mikkelsen (2011:56) berpendapat seperti berikut:

Pendekatan pembangunan partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dan memberikan sarana dan yang perlu bagi mereka supaya dapat

Indria Septian Kusnaeni, 2014

*Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktik dan pemikiran di samping bantuan pembangunan.

Masyarakat akan berpartisipasi dalam pembangunan, apabila mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Karena itu tugas utama dari mereka yang bertanggung jawab di dalam program pembangunan masyarakat ialah mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan bantuan tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka termasuk bagaimana menjadikan mereka memperoleh kepuasan. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan yang belum mereka rasakan dan memiliki rasa sadar akan pentingnya rasa kepuasan bagi mereka.

Partisipasi mengambil bentuk dalam berbagai pola atau aktivitas. Partisipasi yang selalu dikaitkan dengan kegiatan masyarakat, pemerintah dan swasta adalah partisipasi dalam pembangunan. Mubyarto (dalam Sumaryadi, 2010:49), menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:

- a. Kegiatan sasaran pembangunan masyarakat, yaitu perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, pembangkitan partisipasi masyarakat, dan penumbuhan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tidak berdiri sendiri, melainkan diusahakan agar yang satu berkaitan dengan yang lain, sehingga ketiganya dapat dianggap sebagai satu paket usaha.
- b. Peningkatan taraf hidup masyarakat diusahakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat, dan juga sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat.

- c. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.
- d. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri terdapat hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi satu mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat yang berkemampuan demikian bisa membangun desanya dengan atau tanpa partisipasi vertikal dengan pihak lain.
- e. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya.

Partisipasi masyarakat juga dikenal dalam konteks pembangunan sosial politik. Menurut Budiardjo (dalam Sumaryadi, 2010:52) partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan berikut.

Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya.

Pernyataan Budiardjo di atas didukung oleh Riwu Kaho (dalam Sumaryadi, 2010:52) bahwa konsepsi partisipasi terkait secara langsung dengan ide demokrasi, di mana prinsip dasar demokrasi “dari, oleh, dan untuk rakyat”. Partisipasi pembangunan politik harus mengarah pada proses demokratisasi. Berkaitan dengan itu, konsepsi partisipasi dalam demokrasi dijelaskan oleh Michles (dalam Sumaryadi, 2010:52) berikut:

Memberikan pada setiap warga negara kemungkinan untuk menaiki jenjang skala sosial dan dengan demikian menurut hukum membuka jalan bagi hak-hak masyarakat untuk meniadakan semua hak istimewa yang dibawa sejak lahir serta menginginkan agar perjuangan demi keunggulan dalam masyarakat ditentukan semata-mata oleh kemampuan seseorang, atau dengan kata lain prinsip partisipasi bertujuan untuk menjamin

Indria Septian Kusnaeni, 2014

*Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengaruh dan partisipasi yang sama dalam mengatur kepentingan bersama bagi semuanya.

Akhirnya, partisipasi bukan untuk partisipasi. Partisipasi dijalankan untuk kepentingan manusia, karena itu, penting untuk menjamin asas pemanfaatannya. Untuk menentukan kriteria manfaatnya, kita mengadopsi lima kriteria Uphoff (dalam Sumaryadi. 2010:53) untuk menjamin partisipasi pemanfaatan dalam rancangan program dan pelaksanaan. *Pertama*, taraf partisipasi yang dikehendaki mesti diperjelas sejak semula dan dengan cara yang dapat diterima untuk semua pihak yang bersangkutan. *Kedua*, harus ada tujuan yang realistis untuk partisipasi dan kelonggaran mesti diberikan untuk kenyataan bahwa beberapa tahap perencanaan, seperti konsultasi rancangan, akan secara relatif berlarut-larut. *Ketiga*, diperlukan untuk memanfaatkan organisasi-organisasi yang ada untuk mencapai tujuan, dan rancangan untuk mempermudah organisasi yang sesuai dengan budaya setempat. *Keempat*, mesti ada komitmen keuangan yang terpisah, memadai untuk partisipasi masyarakat, kemauan baik saja belum cukup. *Kelima*, mesti ada rencana untuk bersama-sama memikul tanggungjawab disemua tahap siklus program dan proyek.

2.2 Pembangunan Politik

Pembangunan Politik merupakan salah satu kajian politik dengan perspektif developmentalism. Konsep pembangunan politik hadir pasca Perang Dunia II, dimana negara-negara di Asia-Afrika mulai memasuki era kemerdekaan setelah lepas dari cengkraman kolonialisme. Bangsa - bangsa yang baru merdeka

Indria Septian Kusnaeni, 2014

*Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tersebut haruslah segera melakukan konsensus untuk menyamakan persepsi mereka tentang tujuan negara yang hendak dicapai yakni masyarakat yang adil dan sejahtera. Berbagai upaya untuk menyamakan persepsi tersebut kemudian menjadi substansi utama dari studi pembangunan politik (Warsito, 1999:56).

Sebagai salah satu negara-bangsa yang baru menyatakan kemerdekaannya pasca berakhirnya Perang Dunia II, Indonesia pun mengalami suatu kondisi yang serupa, dimana elit bangsa yang kala itu kebanyakan berlatar tokoh pergerakan dan pelajar mengadakan konsensus tentang konsep Republik Indonesia yang hendak dirumuskan. Pergantian sistem pemerintahan yang silih ganti berubah, serta perdebatan panjang antara tokoh-tokoh bangsa tentang dasar negara menandai periode awal kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya muncul dominasi eksekutif setelah Dekrit Presiden bulan Juli tahun 1959 yang berujung pada kestabilan sistem politik autokrasi di bawah Presiden Soekarno dengan memaksakan sebutan “demokrasi terpimpin” untuk menamai sistem politik yang sedang berlangsung kala itu. Sedangkan masyarakat saat ini jauh lebih mengenal era tersebut dengan istilah Orde Lama.

2.2.1 Definisi Pembangunan Politik

Pembangunan politik menurut Amir Machmud (1986:5) adalah pembaharuan struktur dan kultur kehidupan politik, diharapkan akan terwujud tata kehidupan politik Pancasila yang mampu membawa bangsa dan negara Indonesia ke arah tercapainya cita-cita nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Definisi pembangunan politik menurut Muhaimin (1985:5-10) mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi.

Ketika pertama kali perhatian diarahkan pada masalah-masalah pertumbuhan ekonomi dan perlunya mengubah perekonomian yang berjalan lambat menjadi dinamis dengan pertumbuhan yang swa sembeda, ahli-ahli ekonomi dengan cepat menunjukkan bahwa kondisi-kondisi sosial dan politik dapat memainkan peranan penentu yang dapat menghalangi ataupun membantu peningkatan pendapatan perkapita. Sehingga pantaslah pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat membantu jalannya pertumbuhan ekonomi (Paul A. Baran, 1957: 6 dalam Muhaimin 1985: 6).

Tetapi secara operasional pandangan tentang pembangunan politik seperti itu pada dasarnya bersifat negatif, sebab lebih mudah bagi kita untuk dengan teliti mengetahui prestasi sistem politik yang mungkin menghalangi atau menggagalkan perkembangan ekonomi daripada menjelaskan bagaimana sistem politik itu membantu pertumbuhan ekonomi.

2. Pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan politik masyarakat industri.

Konsep populer kedua mengenai pembangunan politik, yang juga dikaitkan dengan faktor-faktor ekonomi, menyangkut pandangan abstrak mengenai jenis khas kehidupan politik yang mendasari masyarakat industri maju. Asumsinya adalah bahwa kehidupan masyarakat industri menciptakan tipe kehidupan politik tertentu yang kurang lebih umum dan dapat ditiru oleh masyarakat manapun, baik yang sudah menjadi masyarakat industri atau belum. Menurut pandangan ini, masyarakat industri, baik yang demokratis atau bukan, menciptakan standard-standard tertentu mengenai tingkah laku dan prestasi politik yang dapat

menghasilkan keadaan pembangunan politik dan yang merupakan contoh dari tujuan-tujuan pembangunan yang cocok bagi setiap sistem politik (David Apter dalam Muhaimin, 1985: 7).

Dengan demikian beberapa sifat khas dari pembangunan politik merupakan pola-pola tertentu dari tingkah laku pemerintah yang “rasional” dan “bertanggung-jawab”, yaitu: penghindaran dari tindakan gegabah yang mengancam kepentingan dari golongan masyarakat yang penting, kesadaran akan batas-batas kedaulatan politik, penghargaan terhadap nilai-nilai administrasi yang teratur dan prosedur hukum, pengakuan bahwa politik adalah suatu mekanisme pemecahan masalah dan bukannya tujuan itu sendiri.

3. Pembangunan politik sebagai modernisasi politik

Pandangan bahwa pembangunan politik merupakan pembangunan politik yang khas dan ideal dari masyarakat industri berkaitan erat dengan pandangan bahwa pembangunan politik sama dengan modernisasi politik. Negara-negara industri maju adalah pembuat mode dan pelopor dalam hampir setiap segi kehidupan sosial dan ekonomi, karena itu dapat dimengerti bila banyak orang yang mengharapkan bahwa hal seperti juga terjadi dalam dunia politik. Tetapi justru penerimaan yang terlalu mudah atas pandangan ini mengundang tantangan dari kelompok yang mempertahankan relativisme kebudayaan, yang mempermasalahkan kebenaran dari identifikasi ciri-ciri masyarakat – yaitu barat yang dipakai sebagai standard kontemporer dan universal bagi setiap sistem politik.

Indria Septian Kusnaeni, 2014

*Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4. Pembangunan politik sebagai operasi negara-bangsa

Sampai tingkat tertentu, keberatan-keberatan di atas ditanggapi oleh pandangan bahwa pembangunan politik meliputi pengorganisasian kehidupan politik dan bekerjanya fungsi-fungsi politik sesuai dengan standard yang diharapkan dari negara-bangsa (nation-state). Dalam sudut pandangan ini terdapat asumsi bahwa secara historis terdapat berbagai tipe sistem politik dan setiap masyarakat memiliki bentuk politiknya sendiri-sendiri, tetapi dengan tumbuhnya negara-bangsa modern muncullah serangkaian persyaratan mengenai kehidupan politik. Sehingga, bila suatu masyarakat ingin berprestasi sebagai negara modern, maka lembaga-lembaga dan praktek-praktek politiknya harus disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan tersebut. Politik dari kerajaan lama, masyarakat kesukuan dan etnis, dan tanah jajahan haruslah memungkinkan tumbuhnya kehidupan politik yang diperlukan untuk mewujudkan suatu negara-bangsa yang bisa bekerja efisien dan efektif di dalam suatu sistem dalam lingkungan negara-negara-bangsa yang lain.

5. Pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum.

Apabila kita membagi pembinaan bangsa menjadi pembinaan warga dan pembinaan kewarganegaraan, kita memiliki dua konsep pembangunan politik yang sangat umum. Sesungguhnya, konsep pembangunan politik sebagai pembinaan organisasi memiliki sejarah yang panjang, dan telah mendasari falsafah pemerintahan kolonial yang lebih maju. Karena seperti yang telah kita ketahui dalam sejarah pengaruh Barat terhadap dunia, satu diantara tema-tema pokoknya adalah kepercayaan bangsa-bangsa Eropa bahwa dalam membina masyarakat politik yang harus didahulukan adalah tatanan hukum dan tatanan administrasi.

Tradisi ini memperkuat teori-teori masa kini yang menyatakan bahwa pembentukan demokrasi yang efektif harus memperoleh prioritas utama dalam proses pembangunan. Dalam pandangan ini pembangunan

Indria Septian Kusnaeni, 2014

*Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

administrasi dikaitkan dengan penyebaran rasionalitas, penguatan konsep-konsep hukum sekuler, dan peningkatan pengetahuan teknis dan keahlian dalam pengaturan kehidupan manusia (Max Weber, 1947 dalam Muhaimin, 1985:10).

Tentu saja tidak ada negara yang tidak disebut “maju” apabila negara itu sama sekali tidak memiliki kesanggupan untuk menangani masalah-masalah masyarakat secara efektif, dan nyatanya memang apabila negara baru itu betul-betul memiliki lembaga-lembaga administratif yang mampu, umumnya banyak masalah bisa diatasi. Sebaliknya, administrasi saja tidak cukup, dan bahkan apabila terlalu dianggap penting administrasi itu dapat menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan politik yang dapat menghalangi pembangunan politik. Terutama sekali, konsep pembangunan politik yang hanya diartikan sebagai perbaikan administrasi akan melupakan sama sekali pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi massa, dua hal yang jelas merupakan segi-segi penting pembangunan politik.

6. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa.

Segi lain dari pembangunan politik terutama menyangkut masalah peranan warga negara dan standard-standard kesetiaan dan keterlibatan yang baru. Sehingga dapat dipahami bila di dalam negara-negara bekas jajahan pembangunan politik diartikan sebagai suatu bentuk kebangkitan politik dimana bekas hamba-hamba yang terjajah menjadi warganegara yang aktif dan patriotis.

Di beberapa negara pandangan ini diterapkan begitu ekstrim sehingga segi-segi kehidupan politik rakyat yang berwujud demonstrasi-massal dianggap merupakan tujuan itu sendiri, dan para pemimpin maupun warga

negaranya merasa bahwa mereka sedang memajukan pembangunan nasional dengan memperbanyak dan menggiatkan demonstrasi nafsu politik massal. Sebaliknya, beberapa negara yang betul sedang membuat kemajuan secara teratur dan efektif bisa merasa tidak puas bila mereka bahwa tetangga-tetangganya yang lebih demonstratif sedang menjalankan "pembangunan" yang lebih besar (Clifford Geertz, 1963 dalam Muhaimin, 1985: 11).

Menurut sebagian besar pandangan orang, pembangunan politik memang meliputi perluasan partisipasi massa, tetapi sangat perlu dibedakan kondisi-kondisi bagi perluasan itu. Menurut sejarah, di dunia Barat dimensi pembangunan politik ini dihubungkan erat dengan perluasan hak pilih dan penyertaan unsur-unsur warga negara yang baru ke dalam proses politik.

Proses partisipasi massa ini berarti penyebarluasan proses pembuatan keputusan, dan partisipasi itu mempunyai pengaruh terhadap pilihan dan keputusan. Tetapi dalam beberapa negara baru partisipasi massa itu belum diimbangi dengan proses pemilihan, bahkan pada dasarnya partisipasi massa itu merupakan bentuk baru dari tanggapan rakyat terhadap manipulasi golongan elite. Memang harus diakui bahwa partisipasi yang terbatas seperti itu pun punya peranan dalam pembinaan bangsa, karena partisipasi merupakan sarana untuk menciptakan kesetiaan baru dan perasaan identitas nasional baru (Lloyd Fallers, 1958 dalam Muhaimin, 1985:11).

Dengan demikian, meskipun proses partisipasi massa merupakan bagian sah dari pembangunan politik, tetapi juga penuh dengan bahaya emosionalisme mentah atau demagogi yang merusak, yang keduanya dapat menguras habis sumber daya masyarakat. Masalahnya memang merupakan isu klasik tentang bagaimana menyeimbangkan keinginan rakyat dengan pemeliharaan ketertiban umum, yang sebetulnya merupakan masalah fundamental dari demokrasi.

7. Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi.

Hal-hal di atas membawa kita pada pandangan bahwa pembangunan politik adalah, atau seharusnya sama dengan, pembentukan lembaga-

lembaga dan praktek-praktek demokratis. Dalam pandangan banyak orang tersirat asumsi bahwa satu-satunya bentuk pembangunan politik yang bermakna adalah pembinaan demokrasi. Bahkan ada orang yang menekankan pentingnya hubungan ini dan berpendapat bahwa pembangunan bermakna bila dikaitkan dengan suatu ideologi tertentu, apakah itu demokrasi, komunisme, ataupun totaliterisme. Menurut pandangan ini pembangunan baru berarti bila dihubungkan dengan penguatan nilai-nilai tertentu, dan usaha untuk berdalih bahwa hal itu tidak relevan adalah sama dengan menipu diri sendiri (Joseph La Palombara, dalam muhaimin, 1985:12).

Walaupun banyak kita temukan contoh-contoh yang jelas tentang pengidentifikasian demokrasi dengan pembangunan, banyak timbul tentangan keras dalam ilmu-ilmu sosial terhadap pendekatan demikian. Menggunakan pembinaan demokrasi sebagai kunci bagi pembangunan politik dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk memaksakan nilai-nilai Barat terhadap bangsa lain.

Untuk sementara hanya perlu diperhatikan bahwa banyak orang yang berpendapat bahwa pembangunan betul-betul berbeda dengan demokrasi, dan bahwa justru usaha untuk memperkenalkan demokrasi bisa menjadi hambatan bagi pelaksanaan pembangunan.

8. Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur.

Banyak dari mereka yang merasa bahwa demokrasi itu tidak sesuai dengan pembangunan yang cepat memandang pembangunan hampir semata-mata dalam artian ekonomis dan tertib sosial. Komponen politik dari pandangan seperti itu biasanya berpusat pada konsep stabilitas politik yang berdasar pada kapasitas untuk menyelenggarakan perubahan yang terarah dan teratur. Stabilitas yang hanya merupakan kemandegan dan dukungan sepihak atas status quo jelas bukan pembangunan, kecuali kalau alternatif yang dihadapi adalah keadaan yang lebih buruk. Tetapi stabilitas dapat dihubungkan dengan konsep pembangunan dalam art! bahwa setiap bentuk kemajuan ekonomi dan sosial umumnya tergantung

pada lingkungan yang lebih banyak memiliki kepastian dan yang memungkinkan adanya perencanaan berdasar pada prediksi yang cukup aman (Karl W. Deutsch, 1963 dalam Muhaimin.1985:12).

Pandangan ini dapat dibatasi terutama pada dunia politik sebab suatu masyarakat yang proses politiknya secara rasional dan terarah mampu menyelenggarakan dan mengendalikan perubahan sosial, dan bukan hanya menanggapi saja. jeds lebih "maju" daripada masyarakat yang proses politiknya merupakan korban "kekuatan" sosial dan ekonomi yang mengendalikan nasib rakyatnya. Karena itu, persis seperti yang telah diperdebatkan oleh beberapa orang bahwa dalam masyarakat modern manusia mengendalikan alam demi memenuhi kebutuhannya. jsedang dalam masyarakat tradisional manusia berusaha terutama sekali untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan alam, kita dapat memandang pembangunan politik sebaeti tergantung pada kesanggupan untuk mengendalikan atau dikendalikan oleh perubahan sosial. Dan tentu saja pangkal-tolak untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan sosial itu adalah kesanggupan untuk memelihara ketertiban.

Keberatan terhadap pandangan ini adalah bahwa ia tidak menjelaskan berapa banyak ketertiban yang diperlukan atau diinginkan, dan kearah tujuan tpt perubahan itu seharusnya diarahkan. Juga, apakah penjajaran kestabilan dan perubahanbukan merupakan sesuatu yang hanya bisa terjadi dalam impian kelas meneope. atau paling tidak dalam masyarakat-masyarakat yang jauh lebih baik keadialaai daripada lebagian besar negara sedang berkembang sekarang ini.

Indria Septian Kusnaeni, 2014

*Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Terakhir, menurut skala prioritas pemeliharaan ketertiban, bagaimanapun penting dan diinginkannya. dinomor-duakan. dan yang diutamakan adalah tindakan menyelesaikan masalah sehingga pembangunan memerlukan pandangan yang lebih positif terhadap tindakan (Fred W. Riggs, 1964 dalam Muhaimin, 1985:13).

9. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan.

Pengakuan bahwa sistem politik harus memenuhi persyaratan ukuran prestasi tertentu dan harus ada gunanya bagi masyarakat membawa kita pada konsep pembangunan politik sebagai tingkat kemampuan suatu sistem. Bilamana dikatakan bahwa demokrasi bisa mengurangi efisiensi suatu sistem, maka tersirat asumsi bahwa efisiensi suatu sistem dapat diukur, dan selanjutnya pemikiran tentang efisiensi itu menghasilkan model-model teoritis atau ideal untuk menguji realitas sistem itu (James S. Coleman, 1964 dalam Muhaimin, 1985:14).

Beberapa sistem yang bisa atau tidak bisa menciptakan kestabilan nampaknya akan berjalan dengan kadar kekuasaan yang amat kecil dan para pembuat keputusan yang berwenang hampir tak-berdaya sama sekali untuk memprakarsai dan mencapai tujuan-tujuan kebijaksanaan umum (Eisenstadt, dalam Muhaimin, 1985:14).

Dalam masyarakat-masyarakat lainnya, para pembuat keputusan seperti itu memiliki cukup banyak kekuasaan dan dengan demikian masyarakatnya dapat mencapai tujuan-tujuan bersama yang lebih luas. Negara-negara secara alamiah memang berbeda menurut basis sumber-sumber daya yang dimiliki, tetapi ukuran pembangunannya adalah sama, yaitu tingkat kemampuannya untuk mengerjakan semaksimal mungkin dan mewujudkan dalam kenyataan potensi penuh dari sumber-sumber dayanya itu. Perlu diperhatikan bahwa hal ini tidak dengan sendirinya mengarah pada pandangan yang kasar dan otoriter bahwa pembangunan diartikan sebagai kapasitas suatu pemerintahan untuk menarik

Indria Septian Kusnaeni, 2014

***Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sumber-sumber daya masyarakat. Kapasitas untuk memobilisir dan mengalokasikan sumber-sumber itu biasanya sangat dipengaruhi oleh dukungan rakyat yang diperintah, dan karena itulah mengapa sistem demokratis seringkali dapat memobilisir sumber-sumber daya dengan lebih efisien daripada sistem otoriter yang represif. Memang, dalam artian praktis masalah pencapaian pembangunan politik di banyak masyarakat terutama sekali menyangkut masalah bagaimana memperoleh dukungan rakyat yang lebih besar, ini bukan karena alasan nilai mutlak demokrasi, tetapi karena kesadaran bahwa hanya dengan dukungan itulah sistem yang bersangkutan dapat mewujudkan suatu tingkat mobilisasi kekuasaan yang lebih tinggi.

Bila pembangunan politik diartikan sebagai mobilisasi dan peningkatan kekuasaan dalam masyarakat, dapatlah kita membedakan antara tujuan pembangunan dengan ciri-ciri yang biasanya dilekatkan pada pembangunan. Banyak dari ciri-ciri ini yang dapat diukur, dan karena itu bisa disusun indeks-indeks pembangunan. Item-item dalam indeks seperti itu bisa meliputi: pengaruh dan penetrasi media massa yang diukur berdasar sirkulasi surat kabar dan distribusi pemilikan radio, basis perpajakan masyarakat, proporsi orang-orang yang duduk dalam pemerintahan dan distribusinya dalam berbagai kategori kegiatan, proporsi dari alokasi sumber-sumber untuk pendidikan, pertahanan dan kesejahteraan sosial (Deutsch, dalam Muhaimin, 1985:14).

10. Pembangunan politik sebagai satu segi proses perubahan sosial yang multidimensi.

Kebutuhan nyata akan asumsi-asumsi teoritis sebagai pedoman dalam memilih item-item yang harus dimasukkan dalam setiap indeks pengukur pembangunan seperti di atas, membawa kita pada pandangan bahwa pembangunan politik bagaimanapun juga punya hubungan erat dengan

segi-segi perubahan sosial dan ekonomi yang lain (Max F. Millikan dan Donald L.M. Blackmaker, 1961, dalam Muhaimin, 1985:15).

Hal ini memang benar, sebab setiap item yang mungkin relevan dalam menerangkan potensi kekuasaan suatu negara tentu juga mencerminkan keadaan ekonomi dan tatanan sosialnya. Selanjutnya bisa ditambahkan argumen bahwa tidak perlu dan tidak wajar untuk mencoba mengisolir sama sekali pembangunan politik dari bentuk-bentuk pembangunan lainnya. Meskipun secara terbatas dunia politik bisa dipisahkan dari masyarakat, namun pembangunan politik hanya bisa berjalan dalam konteks proses perubahan sosial yang multi-dimensi di mana tidak ada bagian atau sektor masyarakat yang terlalu jauh tertinggal.

Menurut pandangan ini, semua bentuk pembangunan saling berkaitan. Pembangunan banyak persamaannya dengan modernisasi, dan terjadi dalam konteks searah dimana pengaruh dari luar masyarakat mempengaruhi proses-proses per-jibahan sosial, persis sebagaimana perubahan-perubahan dalam bidang-bidang ekonomi. Sistem politik dan tertib sosial saling mempengaruhi satu sama lain.

Masih ada tafsiran-tafsiran lain mengenai dengan pembangunan politik, misalnya pandangan yang umum dibanyak wilayah bekas jajahan bahwa pembangunan berarti membangkitkan rasa harga diri dan kebanggaan nasional dalam hubungan internasional, atau padangan yang lebih umum di negara-negara maju bahwa pembangunan politik harus mengarah pada jaman purna-

nasionalisme (*post-nationalism*) dimana negara bukan lagi merupakan unit utama kehidupan politik.

Dan kita masih bisa membuat banyak variasi dari berbagai pandangan yang telah kita bahas sejauh ini. Bagi kepentingan kita, pembahasan itu sudah cukup banyak untuk menunjukkan kepada kita: *pertama*, tingkat kekacauan yang ada dalam hal istilah pembangunan politik, dan *kedua*, dibalik kekacauan itu masih ada kemungkinan bagi kita untuk membentuk dasar persetujuan tertentu yang lebih kokoh tanpa mencoba untuk mempertahankan salah satu orientasi filosofis atau kerangka teori tertentu, sangat bermanfaat untuk meneliti berbagai definisi atau pandangan yang kita bahas sejauh ini untuk mencari ciri-ciri pembangunan politik yang paling dapat diterima umum dan paling fundamental dalam pemikiran umum mengenai masalah-masalah pembangunan politik (James, S. Coleman, dalam Muhaimin, 1985:16).

Ciri pokok pertama yang ditunjukkan oleh kebanyakan konsep-konsep itu adalah semangat dan sikap umum terhadap persamaan (*equality*). Dalam kebanyakan pandangan mengenai hal ini, pembangunan politik betul-betul berkenaan dengan masalah partisipasi massa dan keterlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi mungkin berujud mobilisasi demokratis atau totaliter, tetapi yang penting adalah bahwa semua orang harus menjadi warga-negara yang aktif.

Persamaan juga berarti bahwa hukum harus bersifat universal, dapat diterapkan pada semua orang, dan pelaksanaannya kurang-lebih bersifat impersonal. Seringkali hal ini berarti pembinaan sistem hukum, dengan kodifikasi hukum dan prosedur-prosedur hukum yang jelas. Tetapi pertimbangan pokoknya

adalah pengakuan bahwa semua orang, kaya atau miskin, kuat atau lemah, harus pada aturan hukum yang sama.

Terakhir, persamaan berarti juga bahwa pemasukan ke dalam jabatan politik harus mencerminkan ukuran kecakapan berdasar prestasi dan bukan pertimbangan-pertimbangan status berdasar sistim sosial tradisional. Asumsi dalam sistim politik yang sudah maju adalah bahwa orang harus menunjukkan jasa yang cukup untuk menduduki jabatan pemerintahan dan para pejabat pemerintah lulus ujian kecakapan yang kompetitif.

Ciri pokok kedua yang kita temui dalam kebanyakan konsep pembangunan politik itu berkaitan dengan kapasitas atau kesanggupan dari suatu sistim. Dalam arti tertentu, kapasitas berkaitan dengan output sistim politik, dan jauh sistim politik dapat mempengaruhi sistim sosial dan sistim ekonomi-juga berhubungan erat dengan prestasi pemerintah dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi prestasi itu.

Lebih khusus lagi, kapasitas pertama-tama melibat masalah besarnya. lingkup dan skala prestasi politik dan pemerintahan. Sistem yang dianggap bisa berbuat lebih banyak dan dapat menjangkau berbagai kehidupan sosial yang lebih luas daripada sistim yang belum maju.

Kedua, kapasitas berarti efektifitas dan efisensi dalam pelaksanaan kebijaksanaan umum. Sistem yang sudah maju dianggap tidak hanya dapat berbuat lebih banyak dari sistim yang belum maju, tetapi juga dapat bekerja lebih

cepat dan teliti. Di sini terdapat kecenderungan kearah profesionalisasi pemerintahan. Diperhatikannya efisiensi dan efektivitas mengakibatkan timbulnya ukuran-ukuran prestasi yang diakui secara universal.

Terakhir, kapasitas dihubungkan dengan rasionalitas administrasi dan orientasi sekuler terhadap kebijaksanaan. Tindakan-tindakan pemerintahan lebih banyak berpedoman pada pemikiran dan pembenaran-pembenaran yang mencoba menghubungkan tujuan dengan sarana dalam cara yang sistimatis. Sehingga perencanaan dapat dilakukan.

Ciri ketiga yang sering muncul dalam diskusi masalah pembangunan politik adalah *diferensiasi* dan spesialisasi (S.N. Eisenstadt, 1964, dalam Muhaimin, 1985:17). Hal ini khususnya berlaku dalam analisa mengenai lembaga dan struktur. Jadi segi pembangunan politik ini pertama-tama menyangkut diferensiasi dan spesialisasi struktur. Jabatan-jabatan dan badan-pemerintah masing-masing cenderung memiliki fungsi yang tersendiri dan terbatas, dan ada persamaan pembagian kerja di dalam pemerintahan.

Dengan differensiasi timbul peningkatan spesialisasi fungsional dari berbagai peranan politik dalam sistem tersebut. Dan terakhir, diferensiasi juga menyangkut integrasi dari struktur-struktur dan proses-proses yang rumit. Artinya, diferensiasi bukanlah fragmentasi dan isolasi bagian-bagian yang berbeda dari sistim politik, tetapi spesialisasi yang didasarkan atas suatu pemahaman mengenai integrasi.

Dengan menerima tiga dimensi ini, yaitu persamaan, kapasitas dan diferensiasi, sebagai inti proses pembangunan tidaklah berarti kita menyatakan bahwa ketiganya mudah dipertemukan satu sama lain. Bahkan sebaliknya menurut sejarah, biasanya terjadi ketegangan yang akut antara tuntutan akan persamaan, kebutuhan akan kapasitas dan proses diferensiasi yang lebih besar.

Penekanan yang lebih besar atas masalah persamaan dapat mengganggu kapasitas dari sistem tersebut, dan diferensiasi dapat mengurangi kadar persamaan karena diferensiasi mementingkan kualitas dan pengetahuan spesialis.

Jadi sebetulnya kita dapat membedakan pola-pola pembangunan menurut sistem yang ditempuh oleh masyarakat dalam usaha menangani segi-segi yang berlainan dari gejala pembangunan (*development syndrome*). Dalam pengertian ini, pembangunan bukan proses yang unilinier (searah dan menaik), bukan pula proses yang dapat diatur berdasar tahap-tahap yang berbeda tegas, tetapi lebih ditentukan oleh luasnya cakupan masalah yang timbul, baik secara terpisah-pisah maupun bersama-sama.

Dalam usaha untuk mencari pola dari proses-proses pembangunan yang berbeda ini dan untuk menganalisa berbagai tipe dari masalah ini, perlu diperhatikan bahwa masalah-masalah persamaan biasanya berkaitan erat dengan budaya politik dan perasaan-perasaan mengenai keabsahan dan keterikatan pada sistem; masalah-masalah kapasitas umumnya berkaitan dengan erat dengan prestasi dari struktur-struktur pemerintahan yang memiliki wewenang resmi

(authoritative); dan masalah-masalah diferensiasi terutama sekali berkaitan dengan prestasi struktur-struktur yang tidak memiliki wewenang resmi (non-authoritative) dan dengan proses politik dalam masyarakat umumnya. Ini berarti bahwa pada akhirnya masalah pembangunan politik berkisar pada masalah hubungan antara budaya politik, struktur Struktur yang berwenang, dan proses politik umumnya.

2.2.2 Pembangunan Politik Orde lama : Era Politik Mercusuar

Sebagai seorang bapak pendiri bangsa, Soekarno merupakan salah satu ideolog yang merumuskan dasar negara Indonesia dimana pemikirannya condong pada upaya membangun kemandirian bangsa dan kedaulatan penuh rakyat atas seluruh tanah air. Soekarno dikenal sebagai seorang yang anti imperialisme dan kolonialisme, karena itu ketika Federasi Malaysia dibentuk pasca hengkangnya pemerintah kolonial Inggris di tanah Malaya, Soekarno menentangnya dengan konfrontasi, karena Federasi Malaysia dianggap sebagai “negara boneka” Inggris untuk melanggengkan imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk baru (Warsito, 1999:45).

Pasca dekrit, dominasi kekuasaan eksekutif dalam sistem politik presidensial di Indonesia memungkinkan Soekarno untuk menentukan arah pembangunan politik serta kebijakan umum lainnya pada masa itu secara autokratif. Soekarno banyak memfokuskan kebijakannya pada pembangunan simbol-simbol kemegahan dan unjuk kekuatan yang dikenal dengan istilah Politik Mercusuar. Soekarno menjadi salah satu inisiator yang menyatukan negara-negara Asia-Afrika yang baru merdeka ke dalam Gerakan Non-Blok dan

bahkan Indonesia mampu menjadi negara penyelenggara Konferensi Asia-Afrika di Kota Bandung yang menjadi momen paling bersejarah kala itu. Soekarno juga mendirikan monumen-monumen kemegahan lainnya yang secara fisik masih bisa kita saksikan hingga kini seperti monumen nasional (monas), stadion senayan (kini Gelora Bung Karno) yang menjadi stadion sepak bola terbesar di dunia kala itu, serta Patung Selamat Datang Jakarta yang dibuat untuk menyambut peserta Asian Games. Soekarno pula yang mencetuskan ide tentang konfrontasi dengan Malaysia, nasionalisasi aset-aset asing, dan bahkan “membebaskan” Papua Barat dari Kerajaan Belanda. Bahkan, kala itu Amerika Serikat sekali pun tak punya pilihan selain mendukung Indonesia serta ikut menekan Belanda secara diplomatik untuk menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia.

Semua hal itu dilakukan Soekarno sebagai upaya untuk membangun rasa percaya diri bangsa Indonesia yang kala itu masih merasa inferior di tengah-tengah bangsa maju yang mendominasi dunia. Selain itu, Soekarno juga merasa perlu untuk membangun simbol-simbol kemegahan dan unjuk kekuatan sebagai alat untuk menyatukan seluruh elemen bangsa yang masih terkotak-kotak dalam berbagai perbedaan. Hal ini dapat dipahami, karena Indonesia sebenarnya bukan sebuah bangsa yang homogen dengan akar sejarah yang sama. Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa yang memiliki akar sejarahnya masing-masing, pernah hidup dalam sebuah entitas politik yang berbeda-beda hingga pada akhirnya

disetarakan oleh penjajah yang sama, sehingga menimbulkan kesadaran akan ketertindasan yang sama serta berujung pada semangat nasionalisme.

Dengan diberlakukannya politik mercusuar ini, pembangunan politik orde baru lebih banyak menyentuh aspek - aspek politik ketimbang menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera yang menjadi tujuan dari pendirian republik sesuai dengan konstitusi, UUD 1945. Karena itu, diakhir periode pemerintahan Orde lama, perekonomian Indonesia terpukul dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi akibat program-program raksasa yang dicanangkan oleh rezim Orde Lama, termasuk kegagalan nasionalisasi aset-aset asing yang berbiaya tinggi. Pengeluaran anggaran negara yang berlebihan tidak diimbangi dengan perencanaan yang efektif, sehingga menyebabkan defisit anggaran yang membengkak dan utang yang menumpuk. Kondisi ini menggerakkan sejumlah elemen masyarakat menyuarakan tuntutan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang mulai memburuk dan memaksa rezim untuk turun.

2.2.3 Pembangunan Politik Orde Baru : Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi

Setelah serangkaian dinamika politik yang terjadi pada akhir masa kekuasaan Soekarno, munculah Jendral Soeharto di tampuk kepemimpinan nasional yang mendapatkan legitimasi kekuasaannya dari Surat Perintah yang ditanda-tangani oleh Soekarno pada 11 Maret 1966, meskipun hingga saat ini

peristiwa itu masih menjadi salah satu misteri sejarah terbesar di republik ini yang belum diketahui kebenarannya secara pasti. Yang pasti, sejak hari itu hingga 30 tahun setelahnya, Indonesia mengalami kondisi politik yang sangat stabil dengan sedikit saja pergolakan yang kemudian bisa diredam secara efektif karena penguasaan negara atas ruang publik secara penuh melalui kontrol terhadap media massa, serta kebijakan keamanan dalam negeri yang cenderung totaliter. Era berkuasanya Presiden Soeharto dikenal dengan Orde Baru, dan pada masanya Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang bombastis, ditopang dengan kestabilan politik yang memang sengaja dirancang untuk berkembangnya pertumbuhan ekonomi secara masif.

Pada awal kekuasaannya, Soeharto banyak mengoreksi kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan di era sebelumnya seperti kembali bergabungnya Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (setelah sebelumnya keluar karena persoalan dengan Malaysia), gencatan senjata dengan Federasi Malaysia dan normalisasi hubungan kedua negara, pembekuan gerakan komunis di Indonesia yang disusul dengan pembantaian masif mereka yang terduga PKI di seluruh negeri, termasuk pengucilan politik terhadap pelajar yang sedang menyelesaikan studi di Uni Soviet, dibukanya keran diplomasi dengan negara-negara barat (yang sebelumnya condong pada blok timur) serta dibukanya keran liberalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam, utamanya sektor pertambangan, dan penanaman modal asing.

Indria Septian Kusnaeni, 2014

*Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pemerintahan Orde Baru dalam konsep pembangunannya mengacu pada konsep trilogi pembangunan dan delapan jalur pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil (Waskito, 1995:34) Secara teknis, pemerintah Orba membagi tipologi pembangunan dalam 2 tahap, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun. Jika dicermati secara kritis, konsep pembangunan ala Orde baru hanya “menjiplak” formula pembangunan ilmuwan ekonomi barat seperti Rostow serta Harrod - Domar yang mengedepankan tahapan pembangunan secara sistematis berurutan.

“Penjiplakan” konsep pembangunan ala barat dalam konsep pembangunan Orde Baru memang bukan hal yang mengherankan karena rezim Soeharto pada awal masa kekuasaannya didukung oleh tim ekonomi lulusan Universitas Berkeley yang oleh sudah dipersiapkan sejak masa sebelum pergantian rezim yang oleh banyak kalangan dituduh sebagai perpanjangan tangan Amerika Serikat untuk mendikte kebijakan ekonomi Indonesia agar sejalan dengan kepentingan AS. Tim ekonomi yang dipimpin oleh Widjojo Nitisastro (alm.) tersebut biasa dikenal dengan sebutan Mafia Berkeley yang kemudian bermetamorfosis menjadi semacam organisasi tanpa bentuk yang memiliki kaderisasi yang mapan melalui

beasiswa untuk orang Indonesia yang berprestasi. Hasil kebijakan yang dilakukan sebagai output dari tim ekonomi ini ialah sejumlah deregulasi berbagai sektor ekonomi, kebijakan penanaman modal asing, penguasaan sejumlah MNC terhadap lahan ekonomi strategis berbasis SDA di Indonesia, dan kebijakan pengetatan anggaran. Namun kebenaran tentang desas-desus tersebut masih dipertanyakan.

Pada masa booming hasil produksi minyak dan harganya sedang bagus di pasar internasional dekade 1970-an hingga 1980-an, Indonesia menikmati masa keemasan dalam bidang ekonomi dan pada masa itu pemerintahan Soeharto mulai banyak menyelenggarakan program-program sosial hingga akhirnya program-program tersebut berhenti saat lengsernya rezim pasca krisis multidimensional yang melanda negara-negara Asia 1997. Pada masa itu Soeharto mulai meminggirkan kalangan sosial liberalis yang sebelumnya menguasai panggung ekonomi di negeri ini dan berpaling pada kalangan nasionalis. Namun, pada awal 1990-an ketika harga minyak turun, Soeharto kembali merangkul mereka sehingga muncul kembali kebijakan pengetatan anggaran dan deregulasi sejumlah sektor.

Pemerintahan orde baru yang mengklaim sebagai pewaris dan pelaksana nilai-nilai luhur bangsa seperti UUD 1945 dan Pancasila menggunakan nilai-nilai tersebut untuk memperkuat kekuasaannya, misalnya dengan mengkanalisasi wadah perhimpunan dalam setiap sektor masyarakat sipil ke dalam organisasi tunggal yang dibentuk oleh pemerintah, pemaksaan pemberlakuan azas tunggal

untuk seluruh organisasi massa, pengendalian (baca: sensor) media massa, penyederhanaan partai politik, pemberlakuan strukturisasi birokrasi daerah yang terpusat, penghapusan sistem masyarakat desa yang demokratis, dsb. Pemerintah orba didukung penuh oleh kekuatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang memiliki dwi fungsi dalam menjaga pertahanan dan keamanan serta politik kekuasaan, serta memiliki kekuatan politik Golkar yang menjadi kanalisasi elemen masyarakat sipil dan birokrasi yang tidak ber-parpol.

Meskipun iklim investasi di Indonesia meningkat, pengangguran mulai menurun, pendapatan per-kapita masyarakat meningkat dan program-program sosial pada masa pemerintahan orde baru dianggap banyak kalangan berhasil, akan tetapi kehidupan demokrasi dan kebebasan sipil kala itu sangat buruk. Pelanggaran HAM kerap terjadi sebagai bagian dari pola reaksioner negara dalam membendung arus demokratisasi, etnis tionghoa dan keluarga eks-tapol mendapatkan kesulitan yang luar biasa dalam ikhtiar kehidupannya. Dalam kehidupan ekonomi sekalipun, pemerintah dinilai hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dinilai lalai untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan yang adil bagi seluruh masyarakat yang harusnya dicapai oleh pemerintah orde baru yang mengklaim menjalankan Pancasila, sebab butir kelima Pancasila berbunyi, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

2.2.4 Pembangunan Politik Era Reformasi : Menuju Era Partisipasi Warga

Indria Septian Kusnaeni, 2014

*Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Memasuki Era Reformasi pasca lengsernya Soeharto, konsep pembangunan politik Indonesia mengalami pencarian format baru yang di dasari pada semangat demokratisasi di bidang politik yang diharapkan berimbas pada demokratisasi di lapangan ekonomi. Akan tetapi, pemimpin yang berkuasa di awal era reformasi pada mulanya hanya berkuasa dalam jangka waktu pendek, karena itu belum ada formulasi kebijakan tentang arah pembangunan politik yang hendak dituju seperti halnya pada era Orde Baru dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang secara tegas menunjukkan visi pembangunan Indonesia masa depan.

Akan tetapi, di awal berlangsungnya era reformasi sejumlah kebijakan ekonomi-politik yang fundamental diterapkan, beberapa diantaranya merupakan tekanan dari pihak asing sebagai konsesi politik yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan dukungan guna memulihkan Indonesia dari kondisi krisis. Ciri yang paling menonjol dari perubahan orientasi kebijakan ekonomi Indonesia ialah liberalisasi dalam beragam sektor, pengetatan anggaran belanja negara, dan deregulasi dalam sistem perdagangan. Orang-orang yang duduk di jajaran pengambilan keputusan dalam sektor-sektor strategis masih didominasi oleh kelompok Berkeley generasi baru yang memiliki orientasi pemikiran ala Konsensus Washington.

Baru pada tahun 2004, Indonesia mengadakan pemilu presiden langsung sebagai buah hasil amandemen UUD 1945 yang telah berlangsung sebanyak

empat kali, dan menempatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke tampuk kekuasaan. SBY menjadi Presiden RI keenam dan hingga kini menjadi satu-satunya presiden yang berkuasa paling lama sejak era reformasi dimulai 1998. Dan yang paling terpenting adalah, di masa pemerintahan SBY dicanangkan konsep pembangunan masa depan Indonesia yakni Visi Indonesia 2030 yang secara kongkret dijabarkan melalui MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).

Infrastruktur dan suprastruktur politik yang telah dibangun pada masa awal reformasi berupa lembaga-lembaga politik dan sistem politik telah membuka ruang bagi terciptanya masyarakat sipil yang berdaya di alam demokrasi. Karena itu, pada era reformasi ini warga terlibat secara aktif dalam proses pembangunan politik. Pembangunan politik tidak lagi didominasi perumusan konsepnya oleh penguasa yang menentukan arah dan implementasi proyek-proyek tersebut. Dengan iklim demokrasi yang saat ini kondusif, warga masyarakat benar-benar diposisikan sebagai bagian dari aktor konsensus yang memiliki pengaruh dalam pembangunan politik.

Karena itu, meskipun negara sudah mencanangkan Visi Indonesia 2030 dan MP3EI, partisipasi warga masyarakat dalam mengawal pembangunan yang akan berjalan terbuka lebar untuk memberikan input berupa saran, kritik, maupun gugatan kepada penyelenggara negara sebagai aktor utama penyelenggara pembangunan guna tercapainya konsensus yang memungkinkan proses

pembangunan berjalan secara efektif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam sektor-sektor strategis seperti soal subsidi, kebijakan anggaran, program-program sosial meliputi pendidikan dan kesehatan, transportasi publik, dan lain sebagainya mendapat perhatian publik dan implementasinya sangat tergantung pada opini publik yang berkembang.

Kendalanya sekarang hanyalah bagaimana tingkat partisipasi warga yang dibangun secara sadar dan rasional sehingga membuat penerapan sistem konsensus pembangunan politik berjalan dengan baik. Caranya, lembaga-lembaga politik, media massa, LSM yang berkembang dan tumbuh subur di alam demokrasi ini harus memberikan pendidikan politik dan memberikan advokasi warga untuk sadar akan hak-hak politik yang dimilikinya. Karena itu kelak kita tidak akan heran melihat adanya penolakan warga terhadap penambangan di wilayah tertentu karena isu ekologi, penolakan masyarakat adat terhadap pembangunan pabrik di daerahnya karena merusak tatanan sosial di daerah tersebut, ataupun tuntutan warga untuk ganti rugi yang adil dalam proyek infrastruktur. Hal ini merupakan sebuah kondisi yang tidak mungkin terjadi pada rezim pembangunan sebelumnya.